

KATA PENGANTAR

Perencanaan Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis

Perencanaan Strategis dibuat untuk memenuhi kebutuhan organisasi Perangkat Daerah yang baru.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan agar SKPD menyusun rencana Strategis (RENSTRA) beserta perubahannya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima (5) tahun. Dalam Renstra ini mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan OPD baru.

Rencana Strategis Dinas Kominfo 2014-2019 di susun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Kominfo dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika dalam waktu lima (5) tahun 2014-2019.

Dengan demikian semua kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan PERDA OPD baru.

Dengan disusunnya Renstra ini, Kami sampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan IPTEK, dan tantangan

pembangunan ke depan, materi Renstra tahun 2014-2019 yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Kediri,

2018

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KEDIRI

Ir. HARIS CANDRA PURNAMA, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600511 198503 1 017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta statistik dan persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel bidang komunikasi dan informatika.

Dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak public akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi yang dapat meningkatkan kesejahteraannya sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya implementasi e-government secara utuh menjadi tujuan yang diharapkan.

Memperhatikan hal tersebut, berbagai media informasi perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam upaya penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat, disamping dengan tetap mendorong peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi penyebar informasi sekaligus sebagai public relation di daerahnya.

1.1.1. PENGERTIAN RENSTRA

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan tentu memerlukan informasi yang tepat, mudah dan cepat diakses serta akurat.

Untuk mengantisipasi kebutuhan perlu dikembangkan sinergi antara manajemen pemerintahan dan pemanfaatan Teknologi informasi yang didukung keterhubungan jaringan informasi yang mencakup seluruh institusi pemerintah.

Hal ini secara teknis TIK mudah dilaksanakan tetapi pada implementasinya faktor non teknis menjadi kendala.

1.1.2 PROSES PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi Dinas sesuai perundang-undangan agar mencapai hasil yang optimal, maka perlu disusun rencana strategis yang mencakup visi dan misi, tujuan sasaran indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai Selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra selain mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu Dinas Kominfo Kota Kediri berkewajiban menyusun Renstra untuk Tahun 2018-2023.

Untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Dinas Kominfo, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Dinas Kominfo.

Bahan orientasi mengenai Renstra Dinas Kominfo mencakup :

- 1 Peraturan perundang-undangan, antara lain tentang keuangan Negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan, tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran.

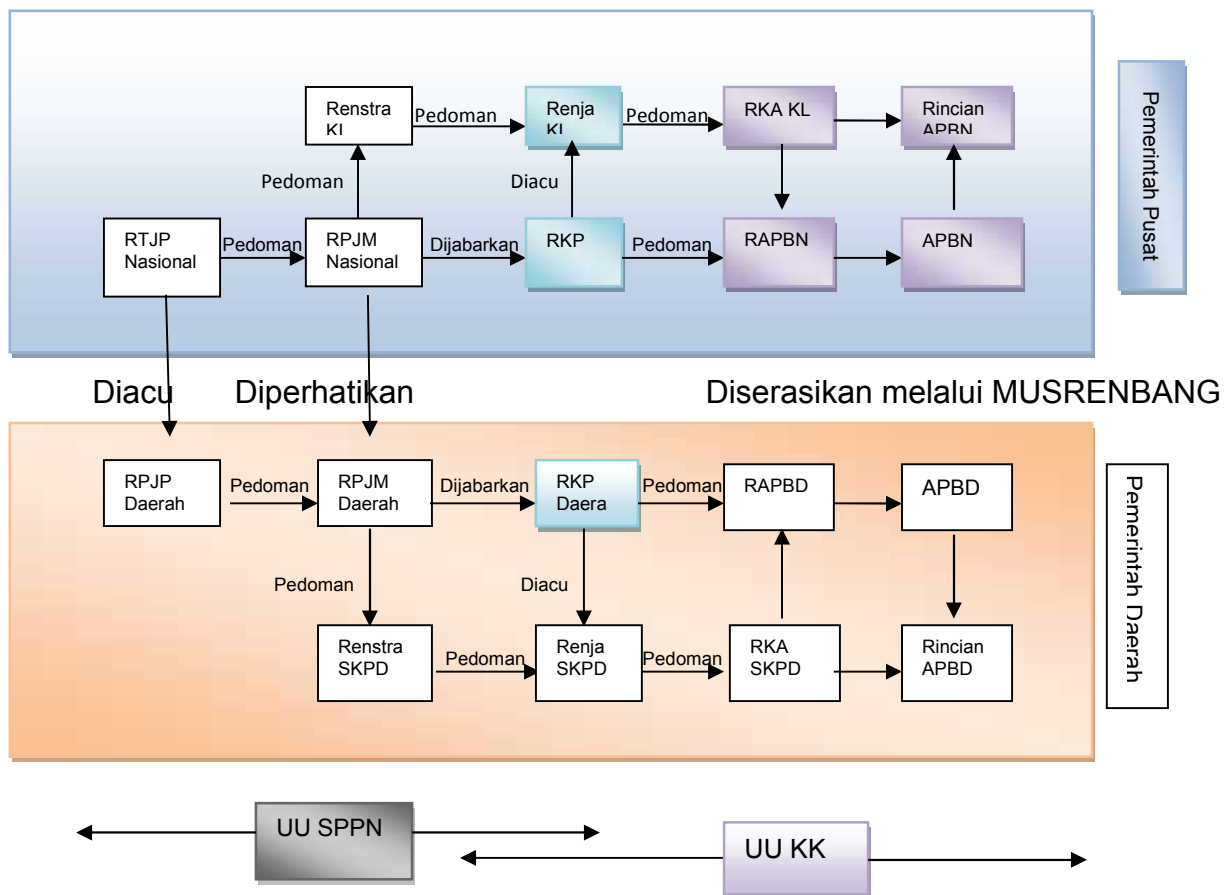
Dalam penyusunan Renstra Dinas Kominfo, telah dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data dan informasi penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen perencanaan.

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis resume/notulen pertemuan bahan paparan, hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam Bagan sebagai berikut :

Bagan 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 (Ada pada file (gambar).



Bagan diatas menunjukkan alur penyesuaian Renstra Dinas Kominfo yang berpedoman pada RPJMD Kota Kediri dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Kominfo. Dengan demikian Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasikan dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Kediri tahun 2018-2023 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Pripinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Noor 45).
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 194), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali erakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Noor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585).
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoan Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019.
- 1.2 Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri
- 1.3. **MAKSUD DAN TUJUAN.**
- Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2014-2019 merupakan Penjabaran misi dan tujuan yang ingin diwujudkan atau dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kominfo adalah :
- a. Sebagai pedoman dalam implementasi strategi, visi, misi Pemerintah Kota Kediri.
 - b. Sebagai Pedoman pelaksanaan Pelayanan dalam jangka waktu 5 tahun.
 - c. Sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran Dinas Kominfo.
 - d. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja.

1.4. **SISTEMATIKA PENULISAN.**

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika sebagai organisasi perangkat daerah di bidang Komunikasi dan Informatika dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, maka dalam Renstra juga akan dijabarkan mengenai permasalahan yang dihadapi dalam menyusun Renstra.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kominfo Kota Kediri Taun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN (OPD) KOTA KEDIRI

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi (OPD) Kota Kediri
- 2.2 Sumber Daya (OPD) Kota Kediri
- 2.3 Kinerja Pelayanan (OPD) Kota Kediri

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan (OPD) Kota Kediri.

BAB III : ISU – ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Propinsi
- 3.4 Telaahan Pelayanan Teknologi Informasi Komunikasi dan Masyarakat pengguna TIK.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (OPD) Kota Kediri
- 4.3 Strategi dan Kebijakan (OPD) Kota Kediri

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat dijabarkan bahwa Dinas Kominfo mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika serta dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dengan kedudukan tersebut Dinas Kominfo mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kounikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan/kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- b. Pelaksanaan kebjakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan.

Dalam pelaksanaannya Dinas Kominfo dibagi dalam 4 Bidang yaitu :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang kesekretariatan.
2. Bidang Statistik, pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Layanan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
3. Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kominfo di bidang penyelenggaraan E-Government, pemberdayaan TIK, pengembangan aplikasi serta persandian, pos dan telekomunikasi serta keamanan informasi.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koinfo di bidang sumber daya komunikasi publik, Kemitraan Komunikasi publik dan tata kelola serta pemberdayaan TIK.

Dinas Kominfo mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- d. pelaksanaan administrasi kedinasan.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Tiap Bidang pada Dinas Kominfo juga memiliki Fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Sekretariat sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran.
 - b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat.
 - d. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Fungsi Bidang Statistik, Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan data.
 - b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan data.
 - c. Pengkoordinasian, Sinkronisasi dan fasilitasi pengelolaan data.
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan data.
 - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Kediri.
 - f. Pengkoordinasian hasil pengelolaan aduan masyarakat dengan instansi terkait.
 - g. Pengkoordinasian pengemasan ulang informasi nasional dan daerah.
 - h. Pengkoordinasian pengelolaan saluran Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah.
 - i. Pengkoordinasian pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Kota dan Non Pemerintah.
 - j. Pengkoordinasian di Bidang Pengelolaan Informasi dan Media Publik.
 - k. Penyusunan rumusan pola pembinaan pelayanan informasi publik.

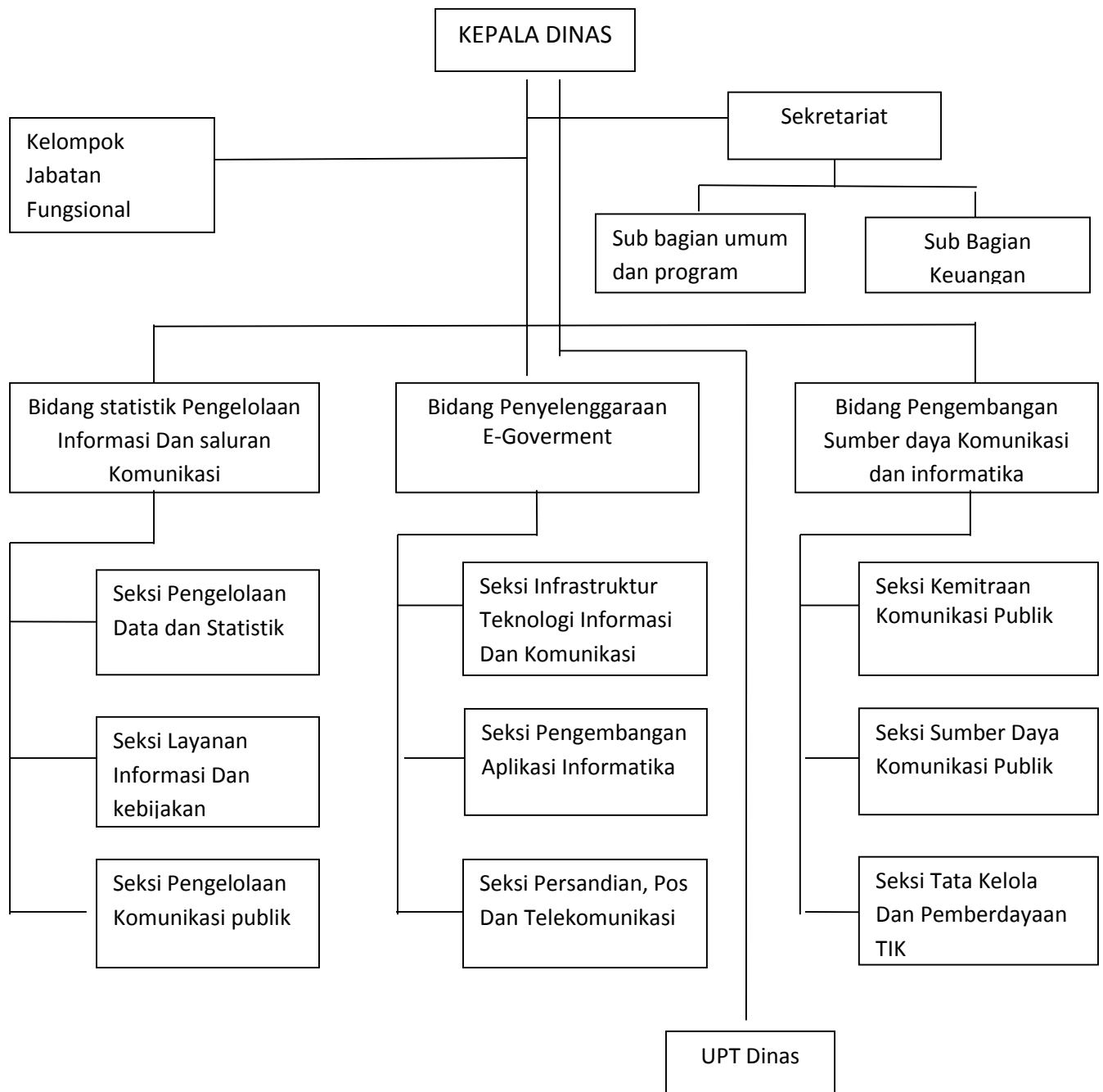
- l. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Informasi Publik.
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Fungsi Bidang Penyelegaraan E-Government sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan aplikasi informatika.
 - b. Pengendalian Persandian, Pos dan Telekomunikasi.
 - c. Fasilitasi Integrasi Pelayanan Publik E-Government.
 - d. Pelaksanaan Pengembangan Perangkat Lunak.
 - e. Perumusan kebijakan infrastruktur TIK dan keamanan informasi.
 - f. Pengkoordinasian kebijakan aplikasi informatika.
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan aplikasi informasi.
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Fungsi Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan GCIO (Government Chief Information Officer).
 - b. Perumusan kebijakan teknis sumber daya komunikasi dan informatika.
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pemberdayaan sumber daya komunikasi publik.
 - d. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat.
 - e. Perumusan kebijakan pelaksanaan informasi publik melalui pecan KIM, gelar produk, pameran pembangunan, media tradisional dan Telecenter.
 - f. Perumusan kebijakan pemberdayaan pejabat fungsional di bidang kehumasan dan komunikasi publik.
 - g. Perumusan kebijakan kegiatan dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).
 - h. Perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Kominfo bagi masyarakat.
 - i. Perumusan kebijakan penguatan hubungan kemitraan lembaga, komunikasi pemerintah, asosiasi profesi komunikasi publik dan lembaga pemantau media.
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sumber daya komunikasi dan informatika.
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

II. 1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMINFO

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, dan Peraturan Walikota Kediri Noor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Struktur Dinas Kominfo Kota Kediri seperti pada gambar 2.1. dipimpin oleh seorang Kepala Kepala Dinas, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bag Umum dan program serta Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Statistik, Pengelolaan Informasi dan saluran Komunikasi yang terdiri atas : Seksi Pengelolaan Data dan Statistik, Seksi layanan Informasi Dan Kebijakan dan Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.
3. Bidang Penyelenggaraan E-Government yang terdiri atas : Seksi Infrastruktuk Teknologi Informasi dan Komunikasi, Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika, Seksi Persandian, Pos dan Telekomunikasi.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informatika yang terdiri atas : Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik, Seksi Tata Kelola Dan Pemberdayaan TIK.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas kominfo
Kota Kediri



Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika 2017

2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo Kota Kediri

Dinas Kominfo Kota Kediri berdasarkan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Dinas Kominfo Kota Kediri saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Basuki Rakhmad No. 15 Kota Kediri. Telpon (0354) 682955 dan Fax (0354) 686813.

Dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kominfo Kota Kediri Tahun 2017 didukung oleh 53 (Lima Puluh Tiga) orang pegawai/karyawan yang terdiri dari 29 (Dua Puluh Sembilan) orang PNS dan 24 (Dua Puluh Empat) orang tenaga teknis pendukung kegiatan.

Data jumlah pegawai Dinas Kominfo Kota Kediri berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan dan golongan adalah sebagaimana gambar/tabel 2.1, 2.2 dan 2.3.

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jabatan di Dinas Kominfo Kota Kediri
Tahun 2017

NO	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Kominfo	Ir. Haris Candra Purnama,MM	Eselon II b
2.	Sekretaris Dinas Kominfo	Drs. Agung Pribadi	Eselon III a
3.	Kabid Statistik, Pengelolaan Informasi Dan Saluran Komunikasi Publik	Anik Sumartini, S.Sos	Eselon III b
4.	Kabid Penyelenggaraan E-Government	Naila Adiba, S.IP, MM	Eselon III b
5.	Kabid Pengembangan Sumber Daya Kominfo	Herwin Zakiyah, ST, M.Eng	Eselon III b
6.	Kasubag Umum Dan Program	Endah Sri Wahyu, SH	Eselon IV a

NO	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	KETERANGAN
7.	Kasubag Keuangan	Dadang Haeruman, SE-	IV a
8.	Kasi Pengelolaan Data dan Statistik	Ayu Widyawardani, S.Sos	IV a
9.	Kasi layanan Informasi dan Kebijakan	Dra. Ratna Nugrahini	IV a
10	Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik	Handy Rindarto, S.Kom	IV a
11	Kasi Infrastruktur TIK	Sapto Handoyo Setiyono, ST	IV a
12	Kasi Pengembangan Aplikasi Informatika	M.Khayat Subkan, M.Kom	IV a
13	Kasi Persandian, Pos Dan Telekomunikasi	Umi Nasrul Habibah, S.Sos, MSi	IV a
14	Kasi Kemitraan Komunikasi Publik	M. Windu Palapa R, SE	IV a
15	Kasi Sumber Daya Komunikasi Publik	Siti Jariyah, S.Kom	IV a
16	Kasi Tata Kelola Dan Pemberdayaan TIK	-	-

Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika 2017

Tabel 2.2

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Dinas Kominfo Kota Kediri Tahun 2017.

NO	NAMA PEGAWAI	PENDIDIKAN
1.	Ir. Haris Candra Purnama	S2 Magister Manajemen
2.	Drs. Agung Pribadi	S1 Sarjana Pendidikan
3.	Herwin Zakiyah, ST, M.Eng	S2 Sarjana Teknik Informatika
4.	Naila Adiba, S.IP, MM	S2 Sarjana Ilmu Manajemen
5.	Anik Sumartini, S.Sos	S1 Sarjana Sosial
6.	Umi Nasrul Habibah, S.Sos, MSi	S2 Sarjana Ilmu Pemerintahan
7.	Endah Sri Wahyu, SH	S1 Sarjana Hukum
8.	Siti Jariyah, S.Kom	S1 Sarjana Komputer
9.	Dadang Haeruman, SE	S1 Sarjana Ekonomi
10.	Dra. Ratna Nugrahini	S1 Sarjana Komunikasi
11.	Sapto Handoyo Setiyono, ST	S1 Sarjana Teknis Sipil
12.	M. Khayat Subhkan, M.Kom	S2 Teknik Informatika
13.	Handy Rindarto, S.Kom	S1 Sarjana Komputer
14.	M. Windu Palapa Rahmad, SE	S1 Sarjana Ekonomi
15.	Ayu Widyawardani, S.Sos	S1 Sarjana Sosial
16.	Nurkolis, ST	S1 Teknik Elektronik
17.	Susi Eko Meiyanto, S.Sos	S1 Sarjana Sosial
18.	Krisna Dwi Pangastuti, SE	S1 Sarjana Ekonomi
19.	Reny Susilowati, SE	S1 Sarjana Ekonomi
20.	Novi Eka Fardiana, SE	S1 Sarjana Ekonomi
21.	Danny Apriono, SH	S1 Sarjana Hukum
22.	Hariyanto	SLTA
23.	Gadang Putro Bagus S, A.Md	D3 Teknik Informatika
24.	Samsun Niam, A.Md	D3 Teknik Informatika
25.	Slamet Sugianto	SLTA
26.	Sugeng	SLTA
27.	Ari Yustiana	SLTA
28.	Sunarmi	SMEA
29.	Slamet Sugianto	Paket B

Tabel 2.3

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan di Dinas Kominfo Kota Kediri Tahun 2017.

NO	NAMA PEGAWAI	PANGKAT	GOLONGAN
1.	Ir. Haris Candra Purnama	Pembina Utama Muda	IV c
2.	Drs. Agung Pribadi	Pembina Tk. I	IV b
3.	Herwin Zakiyah, ST, M.Eng	Penata Tk. I	III d
4.	Naila Adiba, S.IP, MM	Pembina	IV a
5.	Anik Sumartini, S.Sos	Pembina	IV a
6.	Umi Nasrul Habibah, S.Sos, MSi	Penata Muda Tk. I	III b
7.	Endah Sri Wahyu, SH	Penata Tk. I	III d
8.	Siti Jariyah, S. Kom	Penata Tk. I	III d
9.	Dadang Haeruman, SE	Penata Tk. I	III d
10.	Dra. Ratna Nugrahini	Penata Tk. I	III d
11.	Sapto handoyo Setiyono, ST	Penata Tk. I	III d
12.	M. Khayat Subkhan, M.Kom	Penata Tk. I	III d
13.	Handy Rindarto, S.Kom	Penata	III c
14.	M. Windu Palapa R, SE	Penata	III c
15.	Ayu Widyawardani, S.Sos	Penata	III c
16.	Nurkholis, ST	Penata	III c
17.	Susi Eko Meiyanto, S.Sos	Penata Muda Tk. I	III b
18.	Krisna Dwi Pangastuti, SE	Penata Muda Tk. I	III b
19.	Reny Susilowati, SE	Penata Muda Tk. I	III b
20.	Novi Eka Fardiana, SE	Penata Muda Tk. I	III b
21.	Danny Apriono, SH	Penata Muda Tk. I	III b
22.	Hariyanto	Pengatur Tk. I	II d
23.	Gadang Putro Bagus S, A.Md	Penata muda	III a
24.	Samsun Niam, A.Md	Pengatur Tk. I	II d
25.	Slamet Sugianto	Pengatur Tk. I	II d
26.	Sugeng	Pengatur Tk. I	II d
27.	Ari Yustiana	Pengatur Tk. I	II d
28.	Sunarmi	Pengatur	II c
29.	Slamet Sugianto	Juru	I c

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 2018

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Dinas Kominfo meliputi :

- Aset bergerak terdiri dari :
 - 1 Unit mobil Dinas merk yaris AG 93 AP
 - 1 Unit Mobil Operasional Carry AG 512 AP
 - 4 Unit sepeda motor operasional.
- Aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rincian Aset Tetap tahun 2018

NO	JENIS BARANG	MERK	JUMLAH	TAHUN	HARGA
1.	Tv Led	Sharp 02.06.02.06.03	1 buah	2018	Rp. 3.550.000
2.	Hardisk Ex /Tera	02.06.03.03.12	1 buah	2018	Rp. 1.000.000
3.	Printer Epson L 360	Epson 02.06.03.04.08	1 buah	2018	Rp. 2.310.000
4.	Rak Majalah	02.06.03.04.08	2 buah @ 2.000.000	2018	Rp. 4.000.000
5.	AC	Sharp 02.06.02.04.04	2 buah @ 6.000.000	2018	Rp. 12.000.000
6.	Micropone Stand	Z	2 buah	2018	Rp. 1.200.000
	Mic	02.07.01.01.40	2 buah	2018	Rp. 1.200.000
7.	Lemari	02.06.01.04.01	2 unit @ 3.500.000	2018	Rp. 7.000.000
8	Kursi Eselon	IVORA	5 buah @ 2.000.000	2018	Rp. 10.000.000
9.	Filling Kabinet	LION	1 buah	2018	Rp. 5.000.000
10..	Lemari Kaca Hias		1 buah	2018	Rp. 4.350.000
11.	Handy cam	Sony	1 buah	2018	RP. 19.500.000
	Kamera DSLR	Canon	1 buah	2018	Rp. 18.750.000
12.	Software		1 paket	2018	Rp. 20.000.000

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kota Kediri,

Di era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas, Good Government Tata pemerintahan yang baik, merupakan isu pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Semakin ketatnya persaingan global, menuntut setiap institusi untuk dapat menerapkan prinsip Good Government sebagai prasyarat agar mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasi informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia dan sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan Good Government.

Disisi lain kondisi masyarakat belum sepenuhnya paham akan perlunya teknologi informasi dan komunikasi juga perlu memperoleh perhatian agar pada saatnya mereka tidak menjadi kelompok terpinggirkan hanya karena ketidaksiapan dalam memahami peran TIK dalam kehidupannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri melakukan upaya untuk memfasilitasikan terwujudnya Good Governance melalui berbagai Pelatihan dan Sosialisasi Teknologi Informasi. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak dan elektronik seperti majalah dan radio. Selain itu juga melalui media luar ruang seperti Baliho, Spanduk, Bedroop dan lain sebagainya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri juga mempunyai Command Center yang tujuannya sebagai pusat data dari berbagai OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Adapun data yang masuk Command Center nanti menjadi pertimbangan Kepala Daerah dalam menentukan dan mengambil kebijakan sebagai pengukuran kinerja Dinas Kominfo membuat Renstra Tahun 2014-2019 yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2014-2019

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Dinas Kominfo Kota Kediri
Tahun 2014 - 2019

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra SKPD Tahun ke			Realisasi Capaian Tahun ke			Rasio Capaian pada tahun ke		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	% Terlaksananya pengkajian dan penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	41 %	80 %	85 %	125 %	50 %	55 %	304,88 %	160 %	170 %
2.	Persentase SKPD yang terkoneksi melalui website Pemkot.	86,20 %	86 %	88 %	100 %	100 %	100 %	116 %	86 %	88 %
3.	Jumlah SKPD dan atau lembaga yang terkoneksi dengan Jaringan data di PDE	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Keterangan :

Berdasarkan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Kediri serta Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Kominfo terbentuk pada tanggal 1 Januari 2017, Hal ini berpengaruh pada target Renstra SKPD yang dimulai pada tahun 2017.

.Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui bahwa tidak ada kesenjangan pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini dapat diketahui dari hasil capaian yang selalu mencapai target. Dari 2 pelayanan yang termuat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2017-2019 semuanya telah tercapai.

Hal ini terwujud karena dukungan SDM (Sumber Daya Manusia) dan anggaran yang mendukung tercapainya pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana telah di uraikan diatas, maka selain faktor pendukung terdapat aspek keuangan yang sangat berpengaruh untuk mencapai keberhasilan capaian indikator, mengingat operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 – 2019.

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun Ke		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Belanja Langsung	6.809.280.650	6.686.577.000	2.482.843.000	5.828.673.989	5.686.577.000	1.482.843.000
Belanja Pegawai	1.073.673.000	1.063.338.000	2.482.843.000	983.655.000	1.063.338.000	1.482.843.000
Belanja Barang Dan Jasa	4.323.589.850	5.203.339.000	2.200.747.450	4.004.090.389	5.103.339.000	1.200.747.450
Belanja Modal	1.412.017.800	419.900.000	1.000.000.000	840.928.600	419.900.000	1.000.000.000

Tabel 2.7

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Serta Rata-Rata Pertumbuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2017 – 2019.

Uraian	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun (Realisasi Anggaran) x 100%			Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Belanja Langsung	5.828.673.989	5.686.577.000	1.482.843.000	75 %	75 %
Belanja Pegawai	983.655.000	1.063.338.000	1.482.843.000	80 %	80 %
Belanja Barang Dan Jasa	4.004.090.389	5.103.339.000	1.200.747.450	82 %	82 %
Belanja Modal	840.928.600	419.900.000	1.000.000.000	75 %	75 %

Keterangan :

Untuk tahun 2013 – 2016 tidak kami tampilkan karena Dinas Kominfo berdiri pada tanggal 1 januari 2017.

Dari tabel anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri pada tahun pertama untuk penyerapan anggaran pada tahun pertama mencapai 80%, ini berarti berkat kerjasama dan komunikasi yang terjalin dengan baik di lingkungan Dinas Kominfo Kota Kediri.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan Dinas. Berikut merupakan tantangan dan peluang dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Kominfo ke depan.

TANTANGAN :

1. Pengelolaan Website Pemerintah Kota secara terintegrasi.
2. Distribusi Sistem Aplikasi dalam menerapkan penyelenggaraan E- Government.
3. Jaminan keamanan Sistem Teknologi Informasi Komunikasi.
4. Kesenjangan kemampuan Teknologi Informasi Komunikasi Masyarakat.

PELUANG :

1. Lembaga maupun Instansi Pendidikan di Kediri yang bergerak di bidang TIK.
2. Regulasi atau Peraturan yang mengatur pengelolaan TIK.
3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK.
4. Partisipasi Masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM.
5. Media Informasi dan Komunikasi yang digunakan oleh Masyarakat.
6. Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
7. Sarana dan Prasarana Komunikasi penunjang Operasional Pemerintah.
8. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Selain itu, untuk pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika, perlu dilakukan sejumlah analisis atau telaahan terhadap Dokumen lain yang akan mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika ke depannya.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu – isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan Dokumen Renstra, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan di laksanakan.

Isu – Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikansi terhadap perbaikan kondisi masyarakat 5 (Lima) tahun mendatang.

Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal-hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis di identifikasi berdasarkan berbagai permasalahan Pembangunan Daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan Pembangunan Daerah, yang di analisa berdasarkan analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 5 (Lima) tahun mendatang.

Strategi yang baik dalam menangani isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sangatlah diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah yang konkrit/nyata dalam Implementasi Pembangunan. Strategis tersebut juga menunjukkan konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Rencana Strategis yang disebut sebagai RENSTRA.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, maka harus mengidentifikasi dahulu permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas-tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.

Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Kominfo yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi SOP belum optimal
- b. Terbatasnya SDM bidang Teknologi Informasi
- c. Distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat belum optimal.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Kepala Daerah Terpilih

“ Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing. Berakhlak dan Tanpa Korupsi ”.

Makna dalam Visi tersebut adalah :

1. Kota Kediri lebih Sejahtera adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif dalam tata kehidupan (juga dalam tata Pemerintahan) yang aman dan tentram, rukun dan damai disamping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu Diskriminasi, serta bebas dari penindasan dengan Sumber Daya Manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas.

2. Kota Kediri Lebih Berkeadilan adalah terwujudnya Pembangunan yang adil dan merata, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang, seorang maupun sekelompok orang.

Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat Distributif yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan profesionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang di lakukan.

3. Kota Kediri Lebih Berdaya Saing adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Kota Kediri, bukan hanya berdasarkan keunggulan Komparatif, tetapi terutama keunggulan Kompetitif.
4. Kota Kediri Lebih Berakhlak adalah terwujudnya peningkatan akhlak yang mulia, baik secara individu maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual.
5. Kota Kediri Tanpa Korupsi adalah bahwa penataan Kota Kediri melalui upaya Pemerintah memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat Kota Kediri pada dasarnya merupakan tujuan yang ingin dipenuhi oleh Pemerintah Kota Kediri saat ini.

Dari Visi tersebut dirumuskan dalam 4 (empat) Misi Kota Kediri dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Kediri 2014-2019 sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan.
- Misi 2 : Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan.
- Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat yang Agamis, Bermoral, Sejahtera, Berbudaya dan sebagai Pusat Pendidikan.

Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif.

Melihat Identifikasi Permasalahan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kominfo yang berpengaruh sebagai berikut :

Visi : Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi.

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5
1.	Misi 1 Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas Partisipasi Publik dalam Pembangunan.			
	Tahun 2017 - 2019			
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat guna pelaksanaan tugas dan komunikasi	Tidak semua Masyarakat mengetahui Aplikasi.
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Infomasi.	Dana untuk peningkatan Kapasitas SDM belum optimal.	Perlunya Pelatihan TIK secara maksimal	Belum meratanya kemampuan TIK masyarakat.
	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Kurangnya SDM yang menangani Layanan Statistik.	Perlunya integrasi data dari berbagai OPD	Data Statistik masih belum terintegrasi.

	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Perlu dipersiapkan SDM secara maksimal.	Kerjasama dengan Mass Media harus lebih intensif	Minim atau kurangnya informasi dari Mass Media.
	Program Pengelolaan dan Pengembangan jaringan Data Elektronik.	Terbatasnya anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan Jaringan.	Memaksimalkan anggaran yang ada untuk pengembangan dan pemeliharaan jaringan.	Belanja untuk pengembangan dan pemeliharaan jaringan bisa berkurang dalam rapat anggaran.

3.3. Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Propinsi.

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD terkait di Propinsi tahun 2017 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan atau kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.

Telaah ini merupakan proses penting untuk Harmonisasi dan Sinergi antara Renstra Dinas Kominfo Kota Kediri dengan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kominfo terkait di Propinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dengan Propinsi Jawa Timur dan Kota Kediri.

Tabel 3.1

Peran dan Fungsi K/L dan OPD Propinsi Terkait.

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan	Kesenjangan Kemampuan TIK masyarakat.	Distribusi sarana pembelajaran TIK bagi	Kemampuan Integrasi Sistem Pelayanan Publik.

	informatika untuk mendukung fokus pembangunan Pemerintah sebagai wujud hadirnya Negara dalam menyatakan Kedaulatan dan Pemerataan Pembangunan.		masyarakat.	
2.	Tersedianya Akses Pitalebar Nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertanahan dan keamanan.	Distribusi Infrastruktur Jaringan	Legalitas Penyelenggaraan Infrastruktur TIK.	Pengembangan Infrastruktur TIK.
3.	Terselenggaranya Tata Kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing dan aman.	Implementasi SOP tentang Tata Kelola Informasi Internal belum terselenggara.	Kapasitas Sarana dan Prasarana Komunikasi Internal penunjang Operasional Pemerintah	Kewenangan dalam menangani TIK, Informatika.
4.	Terciptanya budaya pelayanan Revolusi mental, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kementerian Komunikasi yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.	Distribusi Sistem Aplikasi dalam menerapkan E-Government	Jumlah tenaga Teknis dan tenaga Ahli TIK terbatas.	Kemampuan Integrasi Sistem Pelayanan Publik.

Dari Tabel 3.1 dapat dilihat keterkaitan peran dan fungsi yang akan di capai oleh K/L dan OPD Provinsi terkait yang nantinya bisa di identifikasikan sebagai faktor pendorong dan penghambat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri dalam mewujudkan perencanaan Program yang berkesinambungan antara Pusat dan Daerah.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan OPD Kota Kediri berdasarkan Renstra OPD Propinsi Jawa Timur dan Renstra K/L terkait beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.

No.	Renstra K/L	Renstra OPD Propinsi Jatim	Permasalahan Pelayanan (OPD) Kota Kediri	FAKTOR	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus Pembangunan Pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan Kedaulatan dan Pemerataan Pembangunan.	Meningkatnya Diseminasi informasi dan keterbukaan Informasi Publik	Kesenjangan Kemampuan TIK masyarakat	Tidak semua masyarakat mengetahui aplikasi	Pengelolaan Komunikasi dan informasi kepada masyarakat guna pelaksanaan tugas dan komunikasi.
2.	Tersedianya Akses Pitallebar Nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Distribusi infrastruktur jaringan.	Legalitas Penyelenggaraan infrastruktur TIK	Pengembangan infrastruktur TIK.
3.	Terselenggaranya Tata Kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing dan aman.	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	Implementasi SOP tentang Tata Kelola Informasi Internal belum terselenggara.	Kapasitas Sarana dan Prasarana Komunikasi internal penunjang operasional Pemerintah.	Kewenangan dalam menangani TIK, Informatika.
4.	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi	Meningkatnya layanan	Distribusi Sistem Aplikasi	Jumlah tenaga teknis dan	Kemampuan Integrasi Sistem

	mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.	penyelenggaraa Telekomunikasi	dalam menerapkan E-Government.	tenaga ahli TIK terbatas.	Pelayanan Publik.
--	---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------

3.4 Telaah Pelayanan Teknologi Informasi Komunikasi dan masyarakat pengguna TIK.

Layanan TIK yang ada di Dinas Kominfo ada beberapa diantaranya :

- a. Layanan surat menyurat
- b. Pengembangan Aplikasi
- c. Penyimpanan Aplikasi dan data Elektronik OPD
- d. Pemeliharaan jaringan dan Peralatan Komputer
- e. Perbaikan Jaringan LAN
- f. Penambahan titik jaringan.
- g. Penyediaan BANDWIDTH
- h. Pelayanan pemberian ijin dan rekomendasi di bidang sandi dan telekomunikasi
- i. Layanan pembuatan Email.
- j. Layanan pengiriman berita
- k. Layanan penerimaan berita
- l. Layanan Aduan On line / Suara Warga
- m. Layanan Penyebarluasan informasi (Radio dan Majalah Barometer)

Layanan yang ada di Dinas Kominfo tersebut sesuai dengan misi 1 yaitu mewujudkan Pemerintahan yang bersih, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan.

Tabel 3.3

Identifikasi Berdasarkan Permasalahan pada Dinas Kominfo.

No.	Kebijakan Dinas Kominfo	Permasalahan Pelayanan Dinas kominfo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru di kembangkan	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika dan telekomunikasi	Jumlah Tenaga Teknis dan Tenaga Ahli TIK	Lembaga maupun institusi pendidikan di Kediri yang bergerak di bidang TIK.
2.	Memperluas penggunaan teknologi informasi yang di dukung penyediaan jaringan internet pada kawasan fungsional di Kota Kediri.	Distribusi Sarana Pembelajaran TIK bagi masyarakat	Distribusi infrastruktur jaringan	Pengembangan Infrastruktur TIK

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu Strategis pada Agenda Nasional dan Provinsi, maka isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. Forum FGD (Focus Group Discussion) dengan melibatkan Narasumber yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Scoring terhadap kriteria yang telah ditentukan.
3. Penilaian Isu Strategis.
4. Penghitungan rata-rata skor atau bobot isu strategis.

Tabel 3.4
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

	Kriteria	Bobot
1.	Manfaat / Dampak Bagi Publik	30
2.	Daya ungkit Pembangunan Daerah	20
3.	Kemungkinan / kemudahan untuk dicapai/ditangani	20
4.	Pokok isu terkandung dalam Visi Misi Kota Kediri	30
	Total	100

Tabel 3.5
Nilai Skala Kriteria

No		Nilai Skala Kriteria ke				Total Skor
		1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kemampuan Integrasi Sistem Pelayanan Publik.	1,5	1	0,8	1,5	4,8
2.	Pengembangan Infrastruktur TIK	1,5	1	0.8	1,5	4,8
3.	Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan TIK	1,5	1	0.8	1.2	4,5

Pengembangan Sistem Pelayanan Publik yang terintegrasi tentunya membutuhkan dukungan infrastruktur yang tidak sedikit. Perkembangan Teknologi yang demikian Pesat, juga harus diikuti dengan pengoptimalan infrastruktur yang ada, agar tidak membebani anggaran, mengingat Kota juga masih memiliki Program-program prioritas yang harus di laksanakan seperti Pendidikan dan Kesehatan, sehingga di dapatkan rumusan isu strategis perlunya pengembangan jaringan informatika dan jaringan telekomunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK.

Pengembangan Sistem Pelayanan Publik yang terintegrasi dan didukung dengan infrastruktur yang memadai, tentunya tidak optimal tanpa adanya partisipasi dari masyarakat untuk memanfaatkan TIK.

Dalam pengembangan Sistem Pelayanan Publik Pemerintah Kota Kediri harus mempertimbangkan kemudahan pemanfaatannya agar dapat di manfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, sehingga didapatkan Rumusan isu Strategis mengoptimalkan saluran Komunikasi Publik untuk mendorong masyarakat memanfaatkan layanan berbasis TIK yang telah disediakan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1.1 Visi dan Misi

Visi Pembangunan Kota Kediri yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah “ *Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi*”, dengan penjelasan sebagai berikut :

Kota Kediri Lebih Sejahtera

Adalah terwujudnya Peningkatan Hidup yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah. Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (basic needs) menjadi prasyarat untuk mencapai kondisi sejahtera dengan standar hidup yang layak. Sehingga dapat terwujud masyarakat Kota Kediri yang lebih sejahtera, hidup dalam situasi dan kondisi aman, tentram, damai, sentosa dan makmur.

Kota Kediri Lebih Berdaya Saing

Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Kota Kediri, tidak hanya berdasarkan keunggulan Komparatif (comparative advantage), tetapi terutama keunggulan kompetitif (competitive advantage). Hal tersebut menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta semakin meningkatkan daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor, khususnya menghadapi ASEAN Economic Community pada tahun 2015.

Kota Kediri Lebih Berakhlak

Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individu maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual. Dengan akhlak yang baik maka akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kota Kediri Tanpa Korupsi

Adalah bahwa penataan Kota Kediri melalui upaya Pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Kediri pada dasarnya merupakan tujuan yang ingin dipenuhi oleh Pemerintah Kota Kediri saat ini. Kondisi tersebut secara ideal dapat terwujud bila dalam pelaksanaan Pemerintahan yang bebas dari korupsi maka perwujudan reformasi birokrasi dan Good Governance mutlak diperlukan. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik yang nantinya penting dalam pencegahan Kolusi, Nepotisme dan konflik kepentingan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Sesuai dengan harapan dari Visi “ *Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi* “, maka ditetapkan misi Pembangunan Kota Kediri sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan sebagaimana berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik. Sasaran dari tujuan ini adalah :

- a. Meningkatnya efektifitas dan kapabilitas kelembagaan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
 - b. Terwujudnya manajemen Aparatur Sipil Negara yang mengarah pada kebutuhan pelayanan prima;
 - c. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. Terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah;
 - f. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah;
 - g. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Umum, kehumasan, dan tata usaha daerah;
 - h. Optimalisasi pembinaan manajemen dan sistem pengelolaan data elektronik dan telematika;
 - i. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip Pemerintah Daerah;
 - j. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
 - k. Optimalisasi perumusan kebijakan Pembangunan Perekonomian;
 - l. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
2. *Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan.* Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan Pembangunan.
3. *Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan.* Sasaran ini tujuannya adalah meningkatnya tertib administrasi kependudukan.
4. *Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan.* Sasaran dari tujuan ini adalah :

- a. Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, nyaman, tentram dan tertib;
- b. Meningkatnya perlindungan dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah;
- c. Terwujudnya sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Misi 2 : Mewujudkan Kota Kediri yang nyaman dan ramah lingkungan,

Memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar perkotaan untuk mendukung pengembangan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sasaran dari tujuan ini adalah :
 - a. Meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi jalan;
 - b. Meningkatnya fungsi Drainase Perkotaan;
 - c. Meningkatnya cakupan pelayanan penerangan jalan umum;
 - d. Meningkatnya fasilitas dan pelayanan perhubungan darat;
 - e. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi;
 - f. Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan energi;
 - g. Meningkatnya Permukiman yang layak.
2. Mewujudkan penataan ruang kota yang ramah lingkungan dan berbasis ekologi. Sasaran dari tujuan ini ialah :
 - a. Optimalisasi fungsi dan potensi Penataan Ruang Wilayah;
 - b. Meningkatnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
3. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sasaran dari tujuan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan pelaksanaan AMDAL ;
 - b. Meningkatnya pengendalian dan pemantauan mutu sumber daya air;

- c. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap penegakan hukum lingkungan;
- 4. Meningkatkan Rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan, memiliki tujuan :

1. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau. Sasaran dari tujuan ini adalah :
 - a. Meningkatnya pemerataan, aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan;
 - b. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
2. Mengembangkan pelayanan, aksesibilitas perpustakaan dan peningkatan minat baca. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan dan meningkatnya minat baca masyarakat.
3. Meningkatkan layanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Sasaran dari tujuan ini adalah :
 - a. Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.
 - b. Meningkatnya akses, kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
4. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha. Sasaran dari tujuan ini adalah menurunnya angka pengangguran.
5. Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan sistematis. Sasaran dari tujuan ini adalah :
 - a. Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - b. Menurunnya persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.
6. Meningkatkan derajat kehidupan keluarga yang berakhlak dan bermoral dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia. Sasaran dari tujuan ini adalah :

- a. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat;
 - b. Meningkatnya fasilitas layanan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan.
7. Mengembangkan pengurus utamaan gender, perlindungan anak, remaja dan perempuan dari segala bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, remaja dan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 8. Mengembangkan dan melestarikan seni budaya lokal. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya kelestarian dan kualitas seni dan budaya lokal masyarakat.
 9. Meningkatkan peran pemuda dan organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan serta meningkatkan prestasi olahraga. Sasaran dari tujuan ini adalah :
 - a. Meningkatnya organisasi dan kegiatan Pemuda dalam Pembangunan;
 - b. Meningkatnya jumlah organisasi olahraga yang dibina dan difasilitasi.
 10. Meningkatkan peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam Pembangunan. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan, ekonomi dan sosial.

Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri Sebagai Pusat Perdagangan, Jasa, Wisata dan Industri Kreatif, memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna meningkatnya investasi atau penanaman modal di Kota Kediri. Sasaran dari tujuan ini adalah terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan berinvestasi.
2. Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan berbasis lingkungan. Sasaran dari tujuan ini adalah :
 - a. Meningkatnya UMKM berbasis lingkungan;

- b. Meningkatnya peran serta koperasi dan UMKM dalam struktur perekonomian.
3. Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan dan hortikultura, pertanian, perkebunan, perikanan. Sasaran dari tujuan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya produktivitas dan produksi tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan;
 - b. Meningkatnya produksi peternakan;
 - c. Meningkatkan produksi ikan.
4. Meningkatkan kecukupan ketersediaan pangan dan keanekaragaman konsumsi pangan. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya ketersediaan pangan yang cukup dan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat.
5. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Kediri. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya kunjungan wisatawan.
6. Meningkatkan percepatan usaha perdagangan. Sasaran tujuan ini adalah meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan.
7. Meningkatkan pertumbuhan usaha perindustrian. Sasaran dari tujuan ini adalah berkembangnya pertumbuhan usaha perindustrian.

Untuk menjabarkan misi ke 1 Dinas Kominfo mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Penataan Kelembagaan dan SDM TIK dan Sosialisasi Kebijakan.
- b. Meningkatkan Koordinasi dan Perencanaan TIK
- c. Membangun Infrastruktur TIK, sistem Aplikasi Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis TIK
- d. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Layanan Penyebaran Informasi Publik.
- e. Memberdayakan Potensi dan meningkatkan peran aktif masyarakat.
- f. Standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi
- g. Mewujudkan jaringan Komunikasi yang efektif dan Efisien.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kota Kediri Tahun 2014-2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya mewujudkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Data Elektronik dan Telematika.
2. Meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis TIK.
3. Meningkatnya Layanan Pengaduan Kepada Masyarakat Berbasis Teknologi IT.
4. Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah melalui Radio.
5. Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Melalui Majalah Harmoni.

Sejalan dengan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri yaitu Mewujudkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ber Inovatif, Terpadu dan Akuntabel Berbasis TIK, maka tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri juga sama dengan sasaran kota pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 adalah “ *Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik.*”

Tujuan yang diemban oleh Dinas Kominfo memerlukan indikator untuk mengukur keberhasilannya. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi 1 Kota Kediri Tahun 2014-2019 yang berbunyi “ *Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan.*” Sasaran ke-8 yang berbunyi “ *Optimalisasi Pembinaan Manajemen dan Sistem Pengelolaan Data Elektronik dan Telematika.*”

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pembinaan Manajemen dan Sistem Pengelolaan Data Elektronik dan Telematika.
2. Terwujudnya Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Meningkatnya Pengelolaan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah Daerah.
5. Meningkatnya Penyebarluasan Informasi dan Distribusi Informasi Pembangunan Daerah melalui Majalah Harmoni.

Keterkaitan RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 dengan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri ditunjukkan pada gambar 4.1 sebagai berikut :

Gambar 4.1

Keterkaitan RPJMD dengan tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo Kota Kediri.

Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi.



Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam Pembangunan, memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme Pelayanan Publik
2. Optimalisasi Pembinaan Manajemen dan Sistem Pengelolaan Data Elektronik dan Telematika.



Tujuan OPD dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Data Elektronik dan Telematika.
2. Meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis TIK
3. Meningkatnya Layanan Pengaduan Kepada Masyarakat Berbasis Teknologi IT.
4. Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah melalui Radio.
5. Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah melalui Majalah Harmoni.



Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pembinaan Manajemen dan Sistem Pengelolaan Data Elektronik dan Telematika.
2. Terwujudnya Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Meningkatnya Pengelolaan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah Daerah.
5. Meningkatnya Penyebarluasan Informasi dan Distribusi Informasi Pembangunan Daerah Melalui Majalah Harmoni.

Tujuan dan Sasaran tersebut di atas selanjutnya di arahkan untuk mencapai beberapa indikator sebagai berikut :

Misi RPJMD adalah :

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam Pembangunan.

Tujuan: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik.

Tujuan Indikator (IKU) adalah sebagai berikut :

- a. Hasil Evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
- b. Persentase partisipasi aktif lembaga Komunikasi Publik dalam pengelolaan Komunikasi Publik.
- c. Persentase Pemanfaatan/Hosting dan Collocation.
- d. Persentase OPD di Lingkungan Pemkot Kediri yang memiliki Aplikasi E-Government.
- e. Persentase Release data Statistik akurat yang tepat waktu.

Sasaran ke bidang E-GOVERNMENT :Meningkatnya Penerapan E-GOVERNMENT.

Indikator Sasaran :Prosentase Penerapan layanan Pemerintahan dan layanan Publik Berbasis TIK secara terpadu.

SASARAN OPD :

- a. Optimalisasi pembinaan manajemen dan sistem Pengelolaan Data Elektronik dan Telematika.
- b. Terwujudnya Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d. Meningkatnya pengelolaan penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintahan Daerah.
- e. Meningkatnya Penyebarluasan Informasi dan Distribusi Informasi Pembangunan Daerah melalui Majalah Harmoni.

Indikator Kinerja (OPD) : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dalam hal ini langsung di bentuk dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Misi RPJMD	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	TUJUAN KOMINFO	INDIKATOR TUJUAN KOMINFO	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam Pembangunan	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Penerapan E-GOVERNMENT	layanan Pemerintahan dan layanan Publik Berbasis TIK secara terpadu.	Meningkatnya Layanan Publik berbasis TIK secara terpadu. Meningkatnya Layanan Pemerintahan yang berkualitas.	Prosentase Layanan Publik berbasis TIK. Prosentase Tindak Lanjut Layanan Informasi.

Tabel 4.2

INDIKATOR SASARAN DINAS KOMINFO KOTA KEDIRI 2014 - 2019

SASARAN RPJMD KOTA KEDIRI	TUJUAN DINAS KOMINFO	INDIKATOR TUJUAN DINAS KOMINFO	SASARAN DINAS KOMINFO	INDIKATOR SASARAN DINAS KOMINFO	TARGET INDIKATOR SASARAN				
					2015	2016	2017	2018	2019
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam Pembangunan	Meningkatnya Penerapan E-GOVERNMENT	layanan Pemerintahan dan layanan Publik Berbasis TIK secara terpadu.	Meningkatnya Layanan Publik Berbasis TIK secara Terpadu..	Prosentase Layanan Publik berbasis TIK.	-	-	75 %	98 %	98 %
			Meningkatnya Layanan pemerintahan yang berkualitas.	Prosentase Tindak Lanjut Layanan Informasi.	-	-	75 %	97 %	97 %

Sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya mengenai Kinerja Pelayanan OPD periode 2017-2019 telah ditunjukkan bahwa pencapaian indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri dengan Dokumen Renstra yang baik telah mencapai 80%, maka pada periode ini untuk indikator yang sama, Dinas Kominfo meningkatkan Standar Mutu dan penilaian dari dokumen perencanaan, sehingga target yang ditetapkan di mulai dari Indikator Kinerja Dinas Kominfo. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan Kualitas yang sesungguhnya.

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kominfo Kota Kediri.

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran-sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2014-2019, maka penting untuk membangun alternatif Strategi dan Kebijakan yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan Strategi yang dipilih agar lebih terarah dan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Dinas Kominfo, maka Strategi yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Terpadu dan Akuntabel Berbasis TIK
MISI 3: Membangun Infrastruktur TIK, Sistem Aplikasi Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
1.Meningkatkan kualitas pelayanan Publik.	1.Meningkatnya Layanan Publik Berbasis TIK secara terpadu.	1. Menyediakan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi	1.Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik Administratif. 2. Pengendalian Keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, Perangkat keras, perangkat lunak)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Data Elektronik
	2.Meningkatnya Layanan pemerintahan yang berkualitas	1. Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan Pembangunan Skala Kota.	1.Mengembangkan komunikasi dan Dialog langsung antara Masyarakat dengan Pimpinan Pemerintah Kota terkait Program - program Pembangunan.	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media.
			Menyediakan Sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media.	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

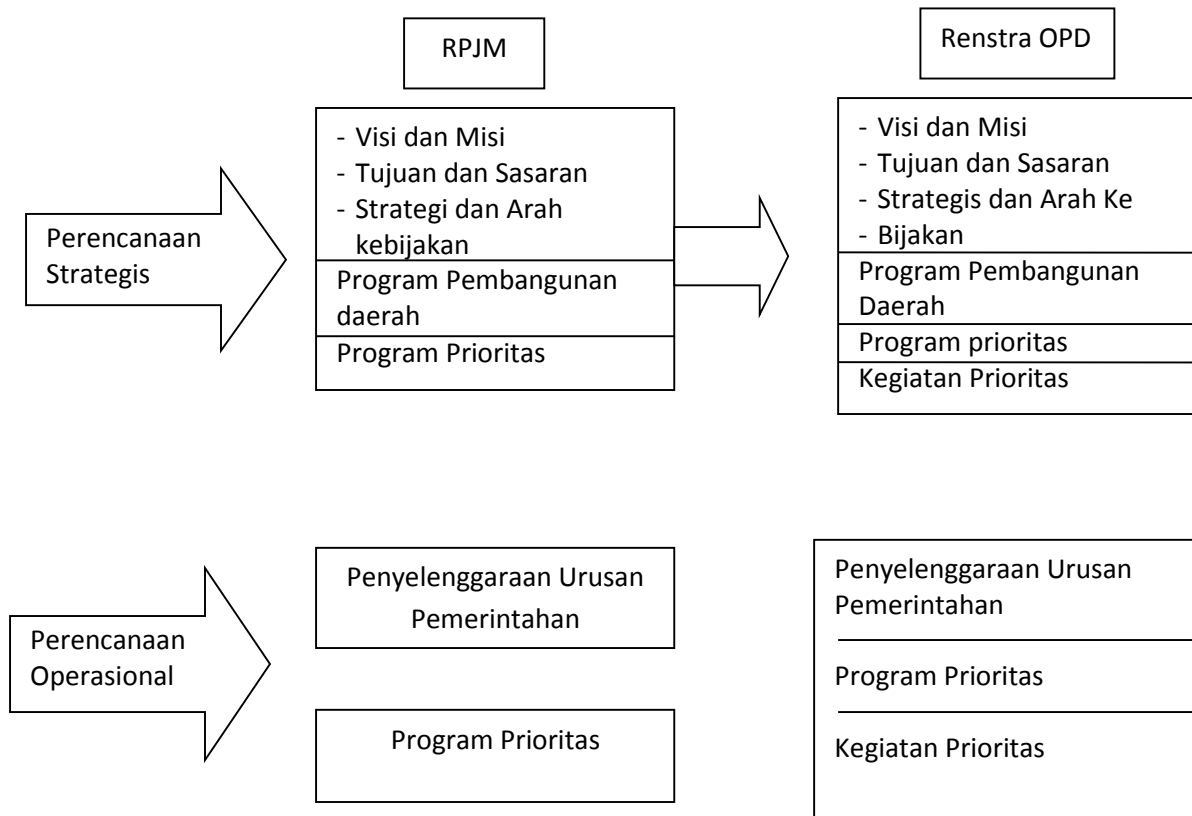
Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategi, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program-program dan kegiatan indikatif.

Disamping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima (5) tahun. Dan Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Organisasi.

Disisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu Rencana Strategis (RENSTRA) yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara indikator Kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan dan pemantauan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Gambar 5.1



Dalam RPJMD Pemerintah Kota Kediri telah menetapkan Program-program dan indikator milik Pemerintah Kota Kediri yang di emban oleh masing-masing OPD.

Pada Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri melaksanakan 6 (enam) program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana yang dialokasikan adalah Rp. 152.252.800,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dana yang dialokasikan adalah Rp. 126.652.950,00
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dana yang dialokasikan Rp. 884.367.500,00
4. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, dana yang dialokasikan adalah Rp. 82. 809.400,00
5. Program Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah, dana yang dialokasikan adalah Rp. 518.148.000,00
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Data Elektronik, dana yang dialokasikan adalah Rp. 5.045.050.000,00

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri pada Tahun 2018-2019 , melaksanakan 8 (delapan) Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi dana sebesar Rp. 300.184.500,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 212.000.000,00
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan dengan alokasi dana Rp. 10.000.000,00
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.553.274.900,00

5. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi dengan alokasi dana sebesar Rp. 81.437.000,00
6. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika dengan alokasi dana Rp. 257.788.050,00
7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media alokasi dana sebesar Rp. 354.303.050,00
8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Data Elektronik dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.917.589.500,00

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri memiliki peran penting pada tiap program yang diampunya. Pada tahun 2017 untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Data Elektronik pada Dinas Kominfo berperan dalam penyediaan Aplikasi Pelayanan Publik Administrasi serta melakukan integrasi aplikasi, pada aplikasi yang sudah ada maupun yang sedang dalam pengembangan.

Pada Tahun 2018-2019 ada 3 (tiga) Program yang di wadahi pada kegiatan Kesekretariatan yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, serta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Tingkat Kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran, dan program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis, Laporan Keuangan dan Dokumen Lakip.

Dalam Program Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah, Dinas komunikasi dan Informatika Kota Kediri berperan dalam melakukan Diseminasi informasi pada masyarakat melalui media Radio, majalah, instagram, website, twitter dan kegiatan sosialisasi.

Pada Tahun 2018-2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri mendapatkan 2 (dua) program baru yaitu Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

Dalam setiap program tergabung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai perwujudan program tersebut. Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini berperan untuk mencukupi honor petugas administrasi keuangan.

2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan ini berperan untuk memenuhi pemeliharaan peralatan kerja, penyediaan ATK, barang cetakan, penggandaan, kebutuhan komponen listrik, mamin rapat, uang transport SPPD.

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor.

Kegiatan ini berperan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor.

2. Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/operasional.

Kegiatan ini berperan untuk memenuhi berfungsinya Kendaraan Operasional/Kendaraan Dinas dengan aman.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor.

Kegiatan ini berperan untuk memenuhi peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

4. Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas/operasional.

Kegiatan ini berperan untuk memenuhi Perbaikan Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional.

Untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdapat kegiatan sebagai berikut :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Kegiatan ini berperan untuk memenuhi Dokumen Renja, Renstra, Lakip, Laporan P1 dan P2.

Untuk Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa, terdapat kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi.
Kegiatan ini berperan membentuk KIM (Kegiatan Informasi Masyarakat) disetiap Kelurahan, seleksi KIM, mengikutsertakan lomba tingkat propinsi, Informasi Pembangunan melalui PERTURA (Pertunjukkan Rakyat), Dialog antara Pemerintah dan Masyarakat.
2. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi.
Kegiatan ini berperan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam menggunakan TIK (Film dan Robot).
Selain itu untuk memenuhi film-film di SKPD untuk meningkatkan promosi Kota Kediri (Kediri Smart City).
3. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi.
Kegiatan ini berperan untuk memenuhi perlengkapan operasional di *Command Center*.
4. Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik.
Kegiatan ini berperan untuk mendukung proses layanan informasi, tertangani dan terdistribusinya pengaduan masyarakat ke masing-masing OPD, meningkatnya kualitas dan pemahaman pelayanan Surga (Suara Warga) dan PPID pada masing-masing OPD, terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) pada pelayanan PPID.
5. Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi Situs Web Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini berperan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemutakhiran Informasi Web Pemerintah Kota Kediri sebagai Sarana penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah Daerah.

6. Pengelolaan Radio Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini berperan untuk meningkatkan pengelolaan program siaran radio sebagai sarana penyebaran Informasi penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah Daerah.
7. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang.
Kegiatan ini berperan memenuhi penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Luar Ruang Secara Optimal.
8. Penerbitan dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
Kegiatan ini berperan untuk memenuhi Diseminasi dan Distribusi Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Majalah Harmoni.

Untuk Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, terdapat kegiatan sebagai berikut :

Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi .

Kegiatan ini berperan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas integrasi data pembangunan melalui Sistem Statistik yang akurat sebagai salah satu alat penyebaran informasi Pembangunan Daerah.

Untuk Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, terdapat kegiatan sebagai berikut :

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi.

Kegiatan ini berperan untuk Pelatihan pembuatan Blog/ Website kepada 230 orang peserta, Listrik 12 bulan, Internet 6 bulan, Pemeliharaan AC.

Untuk Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media, terdapat kegiatan sebagai berikut :

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
Kegiatan ini berperan mengadakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 300 orang peserta, publikasi 6 media selama 1 tahun.

2. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
Kegiatan ini berperan untuk meningkatkan Pelatihan Jurnalistik tingkat SMA dan Komunitas dengan jumlah peserta 300 orang, pelaksanaan partisipasi PHBN dan PHBD.
3. Penyebarluasan Informasi Kebijakan Pemerintah.
Kegiatan ini berperan untuk memenuhi penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah melalui Sosialisasi/ tatap muka, media massa dan cetak/ penggandaan buku produk hukum serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Kebijakan Pemerintah.

Untuk Program Pengelolaan dan pengembangan Jaringan Data Elektronik, terdapat kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Elektronik.
Kegiatan ini berperan untuk memenuhi tersedianya Jaringan Intranet dan Internet.
2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Informasi Elektronik.
Kegiatan ini berperan untuk meningkatkan Layanan Informasi dan Komunikasi Pengadaan secara Elektronik.
3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi.
Kegiatan ini berperan untuk meningkatkan layanan Pemerintah Internal dan Eksternal berbasis TIK dalam manajemen pengambilan keputusan.
4. Pembangunan Sistem Keamanan dan Penyimpanan Data Elektronik.
Kegiatan ini berperan untuk meningkatkan Sistem Keamanan dan Penyimpanan Data Elektronik, serta kelancaran komunikasi efektif dan efisien untuk seluruh OPD, peningkatan SDM yang berkualitas, berakuntabel berbasis IT.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

Indikator Kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Dengan menetapkan indikator Kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi.

Selanjutnya hasil dari evaluasi akan menjadi Indikator Keberhasilan dan Sasaran tujuan dan Sasaran Instansi. Keberhasilan tujuan dan sasaran dari instansi yang selaras dengan RPJMD akan sangat berkontribusi pada Capaian Tujuan dan Sasaran Kota.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri masing-masing bidang berkontribusi pada pelaksanaan pencapaian Sasaran OPD, yakni Sekretariat, Bidang Statistik Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi publik, Bidang Penyelenggaraan E-Government, Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika. Tiap bidang berkontribusi pada pencapaian Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri yaitu tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan TIK (Technic Information Comunication) dalam Pelayanan Publik Administrasi yang berkontribusi secara langsung terhadap Pencapaian Sasaran Kota pada RPJMD Kota Kediri khususnya Sasaran mewujudkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang inovatif, terpadu dan akuntabel berbasis TIK.

Bidang yang secara langsung berkontribusi pada Capaian Indikator ini adalah Bidang Penyelenggaraan E-Government sebagai bidang yang mengampu,mumpuni dalam aplikasi-aplikasi, dashbord, jaringan, website yang berbasis Information Technik (IT).

Tabel 6.1
Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada RPJMD

NO	SASARAN	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya Penerapan E-Goverment	Program Pengelolaan dan pengembangan Jaringan Data Elektronik	Prosentase Layanan publik berbasis TIK	-	-	-	75 %	98 %	98 %
		Program pengembangan Komunikasi Informasi dan media Massa	Prosentase Tindak lanjut Layanan Informasi.	-	-	-	75 %	97 %	97 %

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 merupakan rencana yang disusun dengan mempertimbangkan Lingkungan Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi Dinas Kominfo Kota Kediri Tahun 2014-2019, merupakan rencana tidak seluruh jajaran Dinas Kominfo dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan Misi yang telah ditetapkan serta sebagai pedoman dan rujukan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kediri, Renstra Dinas Kominfo Kota Kediri Tahun 2014-2019 yang berkedudukan sebagai Sub Sistem dari dokumen perencanaan induk Pemerintah Kota Kediri.

Oleh karena itu dalam penyusunannya merujuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri.

Renstra merupakan dokumen perencanaan, sebaik apapun Renstra dan perubahannya tidak akan mampu merubah Dinas Kominfo menjadi SKPD yang hebat dan berhasil mewujudkan Visi dan Misinya tanpa adanya Komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh Aparatur Dinas Kominfo untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk di ikrarkan oleh jajaran Dinas Kominfo, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra harus dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat langsung dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan yang harus di kelola secara Profesional dan Proporsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2014-2019 dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan Good Governance guna menuju terwujudnya Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berinovatif, Terpadu dan Akuntabel berbasis TIK.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KEDIRI

Ir. HARIS CANDRA PURNAMA, MM

Pembina Utama Muda
NIP.19600511 198503 1 017